

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT

Rosdiana¹, Fajar Apriani², Enos Paselle³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung, mengetahui faktor penghambat dan pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung serta untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). berdasarkan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu melalui efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi kepustakaan (*Library Research*), Penelitian lapangan (*Field Work Research*) melalui wawancara langsung dengan *key informan* dan *informan*, Observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dilihat dari efektivitas (*effectivess*), efisiensi (*fficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), ketepatan (*appropriateness*) sudah cukup berhasil dalam mengatasi permasalahan serta mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, berguna dan bernilai bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena sudah memberikan hasil yang lebih baik terutama dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih ada beberapa kendala yang harus segera diperbaiki/diatasi agar proses pelaksanaan kebijakan ini menjadi lebih optimal.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat, Evaluasi Program.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kutai Barat mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga sekarang. Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 Kecamatan. Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rosdiana180@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Kecamatan Linggang Bigung.

Dari Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Linggang Bigung maka dapat dilihat bahwa Kecamatan Linggang Bigung dari awal pelaksanaannya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan dari hasil observasi penulis yang didukung pula informasi dari pendamping PKH, terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan PKH di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat antara lain:

1. Berkenaan dengan kinerjanya:
 - a. Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat penerima PKH disertai kurangnya komunikasi, sehingga adanya masyarakat yang tidak mengerti tentang informasi dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri.
 - b. Penuturan ketua RT 04 beliau mengungkapkan bahwa di kawasan RTnya masih ada penerima PKH yang tergolong mampu secara ekonomi tetapi mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini merupakan permasalahan yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan banyaknya warga miskin lainnya yang keberatan akan hal tersebut.
 - c. Penuturan Bapak Cahyono Wijaya, Amd sebagai pendamping PKH di Kecamatan Linggang Bigung masih kurangnya pendamping PKH mengakibatkan tidak efektifnya pendampingan PKH di Lapangan. Dimana hanya ada 2 pendamping untuk 11 Desa yang ada di Kecamatan Linggang Bigung yang seharusnya 1 pendamping mendampingi maksimal 250 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Berkenaan dengan efisiensi dari pelaksanaan PKH: kurangnya sarana prasarana dalam penyaluran bantuan sehingga membuat para pendamping harus melaksanakan penyaluran bantuan dengan sistem manual dengan cara mengumpulkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengambil bantuannya, yang seharusnya penyaluran bantuan dilakukan secara non tunai.
3. Berdasarkan dengan *output* dari pelaksanaan PKH: masih adanya penyalahgunaan dana oleh penerima PKH yang semestinya digunakan untuk mengakses kebutuhan dasar akan kesehatan dan pendidikan untuk membayar sekolah anak, tidak jarang dipergunakan untuk berbelanja kepentingan lain seperti rokok, pulsa maupun keperluan lebaran saat bantuan turun mendekati hari raya.

Beberapa permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dapat dikaji dalam ranah evaluasi kebijakan publik sebagaimana Subarsono (2016:120-122) mengatakan bahwa tujuan evaluasi kebijakan publik berkaitan dengan kinerja, efisiensi,

keluaran (*output*), hingga dampak suatu kebijakan. sehingga, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah PKH di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui PKH di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, dalam Anggara, 2012:449). Pendapat lain menurut (Anderson, dalam Subarsono, 2016:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2016:119), evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Rossi & Freeman (dalam Pasolong, 2013:6) juga

mengungkapkan bahwa evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berbeda di luar lingkungan politik.

Budjuri & Admin (dalam Pasolong 2013:60) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam kebijakan. Keban (dalam Pasolong, 2013:60), salah satu bidang penting lain yang dipergunakan untuk mengawasi proses jalannya implementasi adalah *monitoring* ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan ialah salah satu tahapan penting dalam proses dalam proses kebijakan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Atau Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2000:610) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup enam indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas
Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi
Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu
3. Kecukupan (*adequacy*)
Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Pemerataan (*equity*)
Kriteria kesamaan atau pemerataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*)
Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan (*appropriateness*)
Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Panduan Umum PKH (2016:16) dijelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dibidang pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas Kementrian dan Lembaga, karena aktor adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*. (Pedoman Umum PKH, 2008:62).

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termaksud sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander (dalam Suud 2006:8) kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan *personal* dan sosial *member* kesempatan kepada mereka untuk memperkembang seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan fokus penelitian antara lain:

1. Evaluasi pelaksanaan PKH:
 - a. Efektivitas (*Effectiveness*)
 - b. Efisiensi (*Efficiency*)
 - c. Kecukupan (*Adequacy*)
 - d. Pemerataan (*Equity*)
 - e. Responsivitas (*Responsiveness*)
 - f. Ketepatan (*Appropriateness*)

2. Faktor penghambat dan pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

Sumber data dalam penelitian ini antara lain data primer diperoleh langsung dari responden atau ada hubungan dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Data sekunder telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli penulis peroleh sumber informan, yakni (a) Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan, (b) Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Menurut Pasolong (2012:130) pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian. Untuk penulisan penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik yaitu: (a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau pengumpulan data sekunder dan (b) Penelitian Lapangan (*Field Work Research*).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *Kualitatif Deskriptif*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model *interaktif* yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yaitu (a) Pengumpulan Data (*Data Collection*), (b) Kondensasi Data (*Data Condensasi*), (c) Penyajian Data (*Data Display*) dan (d) Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Concluction*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi pelaksanaan PKH

a. Efektivitas (*Effectiveness*)

Hasil penelitian tentang efektivitas menurut teori Dunn menyatakan efektivitas diukur apakah hasil yang diinginkan tercapai. Pencapaian tujuan berkaitan dengan kurun waktu dilaksanakannya kebijakan tersebut, dasar hukum dan sasaran program atau kebijakan. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari dilaksanakannya PKH tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pasal 2 yaitu PKH bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan indikator efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cukup efektif dan memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini dilihat kurun waktu dilaksanakannya PKH sejak 2014 di Kecamatan Linggang Bigung sudah mencapai hasil yang cukup baik dengan memberikan bantuan kepada ibu hamil, anak usia dini, SD, SMP, SMA, disabilitas berat, lanjut usia yang merupakan sasaran dari (Program Keluarga Harapan) PKH. PKH ini sudah memberi peningkatan dalam meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dan mengurangi beban pengeluaran keluarga peserta PKH.

b. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi merupakan ketepatan atau suatu cara atau usaha dalam menjalankan suatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan mencapai tujuan kegiatan dengan benar, dengan cara menggunakan sumberdaya, waktu, tenaga yang minimum secara optimal dengan hasil output yang maksimal. Optimal disini bukan berarti menggunakan sumberdaya yang berlebihan, tetapi menggunakan sumberdaya yang ada itu secara baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang baik. Menurut Duun (2000:610), efisien berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian efisiensi dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung dapat disimpulkan bahwa PKH berjalan kurang efisien, dengan beberapa kekurangan yakni sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan PKH masih kurang, tidak adanya fasilitas ruangan yang memadai untuk kegiatan PKH serta minimnya fasilitas komputerisasi dan printer dan ditambah lagi sumberdaya manusia yang terbatas yang dimana jumlah pendamping setiap kecamatan hanya ada 2 orang pendamping yang harus melakukan pendampingan sebanyak 11 Desa. Hal ini dapat membuat pelayanan PKH kurang efektif dan efisien.

Sehingga pada pembahasan efisiensi dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini berjalan kurang efisien dengan kendala-kendala yang ada terkait fasilitas, sarana dan prasarana yang membuat pelayanan PKH kurang efektif dan efisien.

c. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian kecukupan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung dapat disimpulkan bahwa PKH sudah mencukupi kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dan didukung pula Program keluarga Harapan (PKH) yang bersifat komplementaritas yang artinya peserta PKH berhak mendapatkan bantuan lain seperti RASTA, Subsidi PLN, PIS, PIP dan lain-lain gunanya untuk menunjang kesejahteraan peserta PKH.

Secara indikator Kecukupan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cukup dalam tingkat pencapaian hasil dan dapat memecahkan masalah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Meski masih terkendala dengan jumlah penerima PKH yang mana penerima PKH belum bisa di berikan kepada masyarakat miskin secara keseluruhan.

d. Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan dalam kebijakan memiliki arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. Keadilan dalam bahasa sebenarnya adalah memberikan suatu pada tempatnya, adil bukan berarti sama rata melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha dapat secara adil didistribusikan. Masyarakat miskin dalam hal ini yang sebagai sasaran penerima kebijakan dari Program Keluarga Harapan (PKH), harus bisa mendapatkan hak yang patut mereka dapatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian pemerataan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung dapat disimpulkan bahwa PKH ini belum merata didapatkan oleh masyarakat miskin di Kecamatan Linggang Bigung. Hal ini sesuai dengan pernyataan *Key Informen* yang mengatakan PKH belum merata di dapatkan di Kecamatan Linggang Bigung dikarenakan program ini yang mempunyai tujuan untuk mengurangi masyarakat miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

miskin. Yang artinya program ini merupakan proses untuk mengurangi masyarakat miskin sedikit demi sedikit, dan program ini belum mampu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin secara keseluruhan karena berkaitan dengan jumlah penerima bantuan PKH ini mempunyai kuota yang mana proses pendataan tersebut dari Basis Data Terpadu (BDT).

e. Responsivitas (*Responsiveness*)

Suatu keberhasilan kebijakan publik dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijaksanaan dilaksanakan. Oleh karena itu responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan.

Menurut hasil penelitian mengenai respon dari PKH di Kecamatan Linggang Bigung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai sasaran penerima bantuan PKH adalah KPM merasa senang dan antusias dengan adanya bantuan PKH. Salah satu KPM menanggapi sudah cukup terbantu dengan adanya bantuan PKH karena dapat memenuhi kebutuhan kesehatan, sekolah bagi keluarganya seperti mulai dari membeli buku, sepatu, tas dan perlengkapan lainnya. Kemudian mereka sangat antusias mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapat bagi peserta PKH dan mereka berharap agar bantuan PKH ini tetap dilanjutkan.

Secara indikator Responsivitas yang diungkapkan oleh Dunn, dalam kriteria evaluasi kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terpenuhi karena adanya respon positif dari masyarakat miskin sebagai sasaran penerima bantuan PKH yang merasa sudah dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini PKH sudah mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan meningkatkan taraf hidup peserta PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

f. Ketepatan (*Appropriateness*)

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Program Keluarga harapan (PKH) diimplementasikan untuk mengurangi masalah-masalah yang ada dengan memberikan bantuan bersyarat kepada masyarakat miskin dengan kriteria tertentu seperti ibu hamil, anak usia dini, anak SD,SMP, SMA, disabilitas berat, lansia.

Dari hasil penelitian PKH di kecamatan Linggang Bigung dapat dikatakan belum tepat sasaran dibuktikan dengan pernyataan yang dilontarkan informen yang mengatakan bahwa PKH tidak tepat sasaran dikarenakan

ditemukannya di lapangan masih ada masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan bantuan PKH, dan sebaliknya masih ada masyarakat yang tergolong miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan PKH malah tidak mendapatkan bantuan PKH. Hal ini disebabkan data penerima PKH yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga diperlukannya untuk dilakukan pembaruan data dengan mendata kembali masyarakat miskin, dan meng validasi data peserta PKH untuk mengetahui apakah peserta PKH masih berhak mendapatkan bantuan atau tidak.

Sehingga pembahasan terkait ketepatan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah tidak tepat sasaran karena penerima PKH tidak sesuai kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan. Dalam artian yang mana seharusnya peserta PKH harus sesuai dengan komponen PKH yaitu komponen kesehatan berupa ibu hamil, anak usia di bawah 6 tahun komponen pendidikan ada anak SD, SMP, SMA komponen kesejahteraan sosial berupa disabilitas berat, lansia mulai dari umur 60 Tahun sesuai dengan (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3,4,5).

2. *Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung*

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu hubungan baik yang dimiliki oleh instansi yang berkaitan dan komunikasi yang terjalin baik antara instansi, Camat, pendamping. Karena ketika tercipta hubungan baik maka ada dukungan yang terjalin antara pihak atau instansi terkait baik berupa sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Faktor penghambat antara lain yaitu masih terhambat dengan data yang ada, Komunikasi yang susah diakibatkan masih adanya desa yang tidak ada jaringan telekomunikasi. Sehingga kami para pendamping jika ingin melakukan pertemuan kelompok kami harus mendatangi desa tersebut sebelum pertemuan, sarana prasarana terbatas seperti buku P2K2, *banner* untuk pertemuan kelompok dan laptop kami menggunakan milik pribadi, pelaksanaan PKH merupakan sarana dan prasarana yang belum memadai seperti *printer* sehingga ketika pendamping ingin melakukan penggandaan dokumen mereka harus mengeluarkan uang pribadi mereka sendiri, dan Dana operasional yang tidak mencukupi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Efektivitas

Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cukup efektif dan tujuan PKH sudah cukup terlaksana dengan baik dengan kurun waktu dilaksanakannya PKH sejak tahun 2014 di Kecamatan Linggang Bigung. Karena dengan adanya bantuan PKH pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan tidak menjadi beban keluarga sehingga peserta dapat mengahlikan penghasilan mereka yang lebih penting untuk kebutuhan keluarganya. Program ini juga memotivasi Pemerintah untuk meningkatkan target dalam hal mengurangi jumlah kemiskinan di Kecamatan Linggang Bigung.

2) Efisiensi

Dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung belum berjalan secara efisien, karena masih banyak terjadi kekurangan ataupun masalah baik dari segi sarana dan prasarana seperti kurangnya ketersediaan ruangan secretariat untuk PKH, terkendalanya dalam penggandaan dokumen karena printer yang terbatas dan jumlah pendamping yang terbatas.

3) Kecukupan

PKH ini sudah mencukupi dan membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Walaupun belum mampu memberikan kecukupan secara keseluruhan Secara indikator Kecukupan, PKH sudah cukup dalam bidang pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH karena yang mendapatkan bantuan PKH akan mendapatkan bantuan lainya seperti PIP, PIS dan bantuan lainya dari Kementerian Sosial RI.

4) Pemerataan

Program Keluarga Harapan (PKH) belum merata didapatkan masyarakat miskin. Karena adanya jumlah kuota yang ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dimanfaatkan hanya sekitar 40% dari data sensus penduduk miskin. Namun dengan adanya kendala yang perlu diperbaiki pemerintah dalam segi data penerima PKH, akan tetapi dengan jumlah penerima PKH yang ada sudah memberikan dampak yang lebih baik terhadap kehidupan peserta PKH.

5) Responsivitas

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif dengan adanya PKH dapat memuaskan kebutuhan pendidikan, sosial dan ekonomi. kesehatan peserta PKH atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Kecamatan Linggang Bigung.

- 6) Ketepatan
Ketepatan Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum tepat sasaran karena masih ditemukan di lapangan masyarakat mampu mendapatkan bantuan PKH, sedangkan masyarakat yang tergolong miskin tidak mendapatkan bantuan.
- 7) Faktor pendukung
Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ada beberapa faktor pendukung yang dapat memengaruhi pelaksanaan PKH di Kecamatan Linggang Bigung antara lain Hubungan baik antar instansi dan lembaga yang terkait, Sumberdaya manusia yang profesional dalam kinerjanya
- 8) Faktor Penghambat
Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Linggang Bigung ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan PKH antara lain komunikasi yang sulit dilakukan pendamping dengan peserta PKH, uang operasional yang kurang mencukupi kegiatan di lapangan, kurang akuratnya data yang didapatkan dari BDT dengan data yang di lapangan.

Saran

1. Demi kelancaran terlaksananya kegiatan PKH dengan maksimal diharapkan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan mampu menunjang serta mendukung penuh untuk kegiatan pelaksanaan PKH. Agar kegiatan PKH dapat terlaksana dengan baik.
2. Sebaiknya perlu dilakukan pendataan ulang secara berkala terhadap peserta yang mendapatkan bantuan PKH agar dapat dilihat peserta yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan PKH segera dihapuskan dari data penerima PKH. kemudian diharapkan pemerintah melakukan pendataan ke lapangan untuk mencocokkan data yang diterima dari pusat apakah sudah sesuai atau belum.
3. Sebaiknya Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat dan instansi terkait diharapkan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang PKH. Agar masyarakat paham terhadap PKH, dan mengerti tanggungjawab mereka sebagai peserta PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- _____. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Pasolong, Harbani .2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2006. *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suud, Muhammad, 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Pedoman Umum PKH, 2008 oleh Kemsos RI
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Panduan Umum PKH oleh Kementerian Sosial RI Tahun 2013 dan Tahun 2016 dan 2018
- Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.